

PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN MELALUI PENGUATAN UNIT USAHA BUMP DI PONDOK PESANTREN PANGERAN DIPONEGORO

¹Zainal Muttaqin, ²Cinthiya Zakiah Arifah

¹STAI Senori Tuban, ²Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia

Email: zainalmuttaqin@staisenorituban.ac.id, chintyazakiah@gmail.com

Article Info	Abstrack
Article History Received : 12 April 2025 Revised : 25 May 2025 Accepted : 17 July 2025 Available online 25 July 2025, Page 128-145	<i>This community service project aimed to strengthen the institutional capacity of the Pesantren-Owned Enterprise (BUMP) at Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Yogyakarta as an effort to develop pesantren-based economic empowerment. Using participatory and collaborative approaches, the team conducted problem identification, managerial assistance, entrepreneurship training, development of standard operating procedures (SOP), and mapping of business legalization strategies. The results indicate that although BUMP's financial contribution remains limited, its social and functional impacts are significant—especially in supporting pesantren operations, improving access to essential services for the pesantren community, and serving as a platform for student entrepreneurship learning. Moreover, community involvement in managing business units has strengthened pesantren's socio-economic relationships with its surrounding environment. Major challenges such as funding limitations, human resource management, and business legality remain critical areas for long-term improvement. This activity successfully increased institutional awareness, operational capacity, and opened future opportunities for BUMP to grow as a sustainable and inclusive pesantren economic model.</i>
Keywords: BUMP, Pesantren, Empowerment	



Copyright: ©2025. The Authors Journal of Innovation and Contribution to Community Service is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengakar kuat dalam sejarah pendidikan di Indonesia, tidak hanya memiliki peran sentral dalam membina aspek keagamaan dan moral, tetapi juga menyimpan potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi umat (Nurjannah et al., 2025). Potensi ini menjadi semakin nyata di tengah dinamika sosial yang menuntut pesantren untuk tidak hanya berperan sebagai pusat ilmu agama, melainkan juga sebagai motor penggerak ekonomi berbasis komunitas. Kemandirian ekonomi pesantren bukan sekadar untuk menopang keberlangsungan lembaga itu sendiri, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat sekitar

secara berkelanjutan (Sapriadi et al., 2024). Dalam praktiknya, banyak pesantren yang kini mulai mengembangkan berbagai bentuk unit usaha demi memperkuat kemandirian finansial dan mengurangi ketergantungan pada donasi eksternal.

Transformasi peran pesantren ini merupakan respons terhadap kebutuhan zaman, di mana pesantren tidak lagi hanya memusatkan diri pada pengajaran agama, tetapi juga aktif mengambil bagian dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat, pesantren memiliki posisi strategis dalam membina kegiatan usaha yang berbasis pada nilai-nilai Islam, etika, serta pemberdayaan berbasis komunitas (Safitri & Hammam, 2025). Data yang dihimpun oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa dari total 11.868 pesantren di Indonesia, sekitar 90,48% di antaranya telah memiliki unit usaha. Sementara itu, hanya sekitar 9,52% pesantren yang belum mengembangkan kegiatan ekonomi. Menariknya, sebanyak 2,58% pesantren bahkan telah menjalankan tiga hingga lima jenis usaha dalam satu lembaga (Basri, 2021). Fakta ini menggambarkan bahwa geliat ekonomi pesantren sudah cukup kuat dan beragam, meskipun tentu masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.

Dalam kerangka inilah, kehadiran Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) menjadi penting. BUMP adalah wadah kelembagaan yang secara khusus dibentuk oleh pesantren untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai unit usaha yang dimiliki. Fungsi utama dari BUMP adalah mengkonsolidasikan kegiatan ekonomi pesantren dalam satu sistem manajemen yang lebih tertib, profesional, dan berkelanjutan (Riana, 2023). Unit-unit usaha yang dikelola pun sangat beragam, mulai dari produksi barang, jasa pelayanan, hingga distribusi, tergantung pada potensi lokal dan kebutuhan warga pesantren serta masyarakat sekitar. Lebih dari itu, BUMP berperan sebagai instrumen strategis dalam menyalurkan dana usaha kepada pos-pos penting di pesantren. Melalui sistem Dana Bagi Hasil yang diterapkan oleh BUMP, pondok pesantren dapat secara fleksibel mengalokasikan surplus usaha untuk mendukung tiga fungsi utama pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Albirruni, 2024).

Dengan demikian, keberadaan BUMP tidak hanya dimaknai sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem pengembangan pesantren secara menyeluruh. Meskipun semangat pengembangan usaha bisnis sebagai upaya membangun kemandirian pesantren telah berjalan di berbagai daerah, namun pada tataran implementasi, tidak sedikit pesantren yang menghadapi berbagai permasalahan fundamental. Salah satu permasalahan utama terletak pada aspek pengelolaan unit-unit usaha yang belum sepenuhnya optimal dan terstruktur dengan baik (Rahman, 2022). Hal ini menyebabkan berbagai potensi yang sebenarnya bisa dimaksimalkan, justru belum dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pesantren.

Permasalahan tersebut turut ditegaskan oleh temuan penelitian Achmad Nur Alfianto dan Khoirul Anam (2025), yang menjelaskan bahwa salah satu cara pesantren menanamkan jiwa kewirausahaan kepada santri adalah melalui pengelolaan unit-unit usaha mandiri. Akan tetapi dalam praktiknya, pengelolaan

tersebut masih menghadapi sejumlah kendala serius, khususnya dalam aspek manajemen. Mulai dari pengelolaan keuangan yang belum sistematis, kurangnya tenaga pengelola yang profesional, pencatatan transaksi yang tidak rapi, keterlambatan dalam pengadaan stok, hingga lemahnya pengawasan internal. Sebagai contoh, pesantren yang diteliti mengalami kerugian akibat selisih kas karena transaksi yang tidak tercatat, atau kualitas layanan yang menurun karena keterlambatan tenaga kerja.

Dalam konteks ini, Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro di Sembego, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta menjadi salah satu contoh pesantren yang telah memulai langkah konkret dalam membangun kemandirian ekonomi melalui pengembangan unit usaha. Pesantren ini membentuk Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) sebagai wadah kelembagaan untuk mengelola berbagai usaha seperti kantin, layanan laundry, produksi air minum dalam kemasan (Dipo Water), dan bengkel servis kendaraan. Kehadiran unit-unit usaha ini telah memberikan manfaat yang cukup nyata bagi pesantren, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan internal maupun pemberdayaan masyarakat sekitar. Namun demikian, keberadaan BUMP di pesantren ini juga belum sepenuhnya bebas dari tantangan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya modal usaha, tenaga pengelola yang harus merangkap peran di luar unit bisnis, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan secara rutin dan terstruktur. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan BUMP, baik dari sisi manajerial, operasional, maupun pengembangan SDM.

Merespons kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan kontribusi dalam bentuk penguatan kelembagaan BUMP di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Pendekatan yang digunakan mencakup penguatan sistem manajemen usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan sistem pelaporan keuangan dan evaluasi berkala, serta pemetaan potensi pengembangan usaha yang dapat menopang keberlanjutan ekonomi pesantren. Dengan program ini, diharapkan BUMP dapat dikelola secara lebih profesional dan mampu menjadi pilar utama dalam mendukung kemandirian pesantren secara berkelanjutan.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana tim pengabdian secara aktif melibatkan pihak mitra dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan partisipatif digunakan untuk menumbuhkan kesadaran, memperkuat rasa memiliki, dan mendorong keterlibatan langsung mitra dalam proses pengambilan keputusan (Sangian et al., 2018). Sementara itu, pendekatan kolaboratif ditekankan melalui kerja sama yang setara antara tim pengabdian dan mitra pesantren guna mencapai tujuan bersama secara sinergis (Damanik, 2023). Mitra utama yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro yang telah mengelola unit usaha dalam bentuk Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). Pendekatan ini dipilih

karena sesuai dengan karakteristik pesantren yang berbasis komunitas, serta memungkinkan terjadinya proses penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di lingkungan pesantren, khususnya pada empat unit usaha utama yang sedang berjalan, yaitu: kantin, layanan laundry, Dipo Water (air minum dalam kemasan), dan Buwono *Auto Service* (bengkel mobil). Untuk memperoleh data yang relevan dan aktual, tim pengabdian melakukan observasi lapangan, serta wawancara mendalam kepada dua tokoh kunci dalam pengelolaan BUMP, yaitu:

1. Mahbub Junaidi selaku Ketua BUMP, pada tanggal 14 Januari 2025
2. Risyanto selaku pengurus Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, pada tanggal 24 April 2025

Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara dua pihak yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya terhadap suatu isu atau topik tertentu (Syafei et al., 2025). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai sistem manajemen usaha, kendala yang dihadapi, serta aspirasi ke depan dalam mengembangkan BUMP menjadi lembaga usaha pesantren yang berdaya saing tinggi. Selain itu, pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional unit-unit usaha juga dilakukan untuk mengidentifikasi celah perbaikan dalam aspek manajemen, SDM, dan legalitas usaha.

Tahapan kegiatan pengabdian ini mencakup empat langkah utama yang saling berkesinambungan dan dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan mitra serta mendorong penguatan kelembagaan BUMP secara berkelanjutan:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Mitra

Tahap awal ini dilakukan melalui diskusi langsung dengan pihak pesantren, khususnya Ketua BUMP dan perwakilan pengurus yayasan. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk memahami kondisi riil unit usaha yang sedang berjalan. Melalui pendekatan ini, tim pengabdian dapat mengidentifikasi persoalan utama yang dihadapi, seperti kendala permodalan, keterbatasan SDM, manajemen keuangan yang belum tertata rapi, serta aspek legalitas usaha. Proses ini menjadi dasar penting untuk menyusun intervensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra, bukan sekadar solusi dari luar.

2. Penyusunan Strategi Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi, tim menyusun strategi penguatan kelembagaan BUMP yang disesuaikan dengan kapasitas mitra dan sumber daya yang tersedia. Strategi ini meliputi rencana pembenahan sistem pelaporan keuangan, perbaikan alur kerja unit usaha, penyusunan dokumen standar operasional, hingga pemetaan langkah-langkah awal untuk memperoleh legalitas usaha. Strategi disusun secara kolaboratif dan dikonsultasikan kembali

kepada pihak mitra agar benar-benar dapat diterima dan dijalankan secara mandiri.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan program untuk melihat efektivitas setiap tahapan kegiatan. Evaluasi dilakukan setelah program berjalan untuk menilai dampak intervensi serta tantangan yang masih dihadapi. Kegiatan evaluasi melibatkan pihak BUMP, yayasan, serta tenaga operasional unit usaha. Hasil evaluasi digunakan untuk merancang tindak lanjut program dan sebagai bahan refleksi agar penguatan kelembagaan tidak berhenti pada satu kegiatan pengabdian saja, tetapi bisa berlanjut dalam kerangka pengembangan jangka menengah dan panjang.

4. Kontribusi Langsung Tim Pengabdian

Sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian turut memberikan kontribusi langsung dalam penguatan kelembagaan BUMP. Kontribusi ini diwujudkan melalui penyusunan format pelaporan keuangan sederhana yang disesuaikan dengan kemampuan SDM mitra, penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk unit kantin dan laundry, serta panduan praktis untuk pengurusan legalitas usaha, khususnya Dipo Water. Selain itu, tim juga mengadakan pelatihan manajemen dasar bagi pengurus dan petugas unit usaha untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan mereka secara mandiri. Seluruh kontribusi ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan mitra secara aktif dalam setiap proses, agar dampaknya dapat berkelanjutan bahkan setelah kegiatan pengabdian selesai.

Keseluruhan metodologi ini dirancang agar kegiatan pengabdian tidak berhenti sebagai transfer ilmu semata, tetapi benar-benar menghasilkan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan bagi BUMP dan ekosistem ekonomi pesantren secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BUMP Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro

Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro juga merespons kebutuhan kemandirian ekonomi dengan membentuk Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) sebagai bentuk kelembagaan usaha yang secara khusus dirancang untuk menaungi dan mengelola unit-unit usaha di lingkungan pesantren. BUMP hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem manajemen usaha yang terintegrasi, profesional, dan berkelanjutan. Sebelum dibentuknya BUMP, unit-unit usaha dikelola secara terpisah oleh masing-masing lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan, seperti MI, SMP, dan SMK Diponegoro. Pola ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam koordinasi, efisiensi, serta keberlanjutan usaha. Karena itu, penyatuan pengelolaan dalam satu badan usaha menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing ekonomi pesantren.

Secara legal formal, BUMP memang belum terdaftar sebagai badan hukum di bawah negara. Namun, secara administratif dan operasional, keberadaan BUMP

telah memperoleh pengakuan internal melalui Surat Keputusan resmi dari Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Legalitas internal ini menjadi dasar yang sah bagi BUMP untuk menjalankan roda organisasi dan keuangan. Dalam konteks kemandirian pesantren, pembentukan BUMP menjadi tonggak penting dalam membangun sistem usaha yang tidak hanya mendukung kebutuhan pesantren, tetapi juga menciptakan ruang kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Lebih lanjut, BUMP Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro memiliki keistimewaan karena menjadi salah satu pesantren yang tergabung dalam program pembinaan Bank Indonesia (BI) melalui Himpunan Bisnis Pesantren (Hibitren) wilayah Yogyakarta. Keterlibatan ini menjadi peluang penting bagi penguatan kapasitas kelembagaan, terutama dalam hal pelaporan keuangan, sistem tata kelola usaha, hingga potensi kolaborasi dengan dunia usaha nasional. Dengan pembinaan dari BI, BUMP tidak hanya diarahkan untuk mandiri, tetapi juga kompeten dalam mengelola usaha berbasis pesantren yang mampu bersaing di era ekonomi modern.

Melalui struktur kelembagaan yang mulai tertata dan dukungan internal dari Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, BUMP memiliki fondasi awal yang baik untuk berkembang. Namun demikian, proses menuju kelembagaan usaha yang profesional dan berdampak masih membutuhkan penguatan di berbagai aspek, seperti manajemen sumber daya manusia, pencatatan keuangan, dan legalitas formal yang akan menjadi kunci untuk ekspansi usaha lebih luas. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BUMP menjadi langkah strategis agar pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga sebagai agen penggerak ekonomi lokal yang tangguh.

Jenis-Jenis Unit Usaha yang Dikelola

BUMP saat ini mengelola beberapa unit usaha strategis yang berorientasi pada kebutuhan internal pesantren dan potensi pemberdayaan lingkungan sekitar. Beberapa jenis-jenis unit usaha yang dikelola BUMP di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro antara lain sebagai berikut:

1. Kantin

Unit usaha kantin di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro tersebar di empat titik strategis yang mengikuti lokasi lembaga pendidikan formal, yakni MI, SMP, SMK, dan area asrama santri. Keberadaan kantin ini menjadi bagian penting dari sistem pendukung keseharian para santri, guru, dan karyawan. Penjaga kantin direkrut dari berbagai kalangan, seperti masyarakat sekitar pesantren, alumni, dan bahkan istri dari para guru dan karyawan yang mengabdikan diri di lingkungan pondok. Sistem ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial antara pesantren dan masyarakat, tetapi juga membuka peluang kerja lokal dan menciptakan siklus ekonomi mikro berbasis komunitas.

Pengelolaan kantin dilakukan dengan sistem manajerial dasar namun cukup tertib, meliputi penunjukan manajer tiap titik kantin, pelaporan arus kas harian, dan evaluasi rutin oleh bendahara yayasan. Hasil usaha kantin dibagi ke beberapa pihak sesuai kesepakatan awal: sebagian besar untuk lembaga pendidikan pemilik saham, sebagian untuk keperluan sosial dan operasional

yayasan, dan sisanya menjadi pemasukan BUMP. Meskipun belum memberikan profit besar, keberadaan kantin tetap menjadi tulang punggung penyedia logistik harian bagi seluruh ekosistem pesantren, sekaligus menjadi tempat pembelajaran ekonomi mikro bagi santri yang dilibatkan secara terbatas dalam praktik pengelolaan.

2. Dipo Water

Dipo Water merupakan unit usaha yang fokus pada produksi air minum dalam kemasan (AMDK), tersedia dalam ukuran 330ml dengan harga Rp 30.000, dan 600ml dengan harga Rp 37.000. Produk ini dipasarkan secara terbatas untuk kebutuhan internal seperti konsumsi acara resmi, kegiatan lembaga pendidikan, dan konsumsi ketika ada kegiatan bagi para santri. Unit ini sepenuhnya dikelola oleh pengurus BUMP, dengan bantuan operasional dari beberapa santri, khususnya dalam proses pengemasan dan distribusi. Keberadaan Dipo Water menjadi langkah awal pesantren untuk memiliki produk konsumsi sendiri yang bisa menjaga kualitas dan menekan biaya operasional kebutuhan harian.

Namun demikian, pengembangan unit ini menghadapi kendala administratif dan legal, terutama terkait perizinan edar dari instansi pemerintah. Tanpa legalitas formal, produk Dipo Water belum bisa dipasarkan secara luas ke masyarakat luar pesantren, yang padahal memiliki potensi pasar cukup menjanjikan. Kendala ini menjadi perhatian penting dalam upaya penguatan kelembagaan BUMP, agar unit usaha yang memiliki daya saing ini tidak terhenti hanya sebagai konsumsi internal, tetapi juga mampu berkontribusi pada pemasukan pesantren secara lebih luas.

3. Layanan Laundry

Di lingkungan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, layanan laundry dikelola sebagai bentuk layanan domestik bagi santri, yang jumlahnya cukup besar. Dengan biaya tetap Rp50.000 per bulan, setiap santri dapat memanfaatkan jasa laundry sebanyak tiga kali dalam seminggu, dengan batasan berat tertentu (± 1 kg). Fokus layanan ini adalah mencuci pakaian yang bersifat wajib seperti seragam sekolah, pakaian salat, dan perlengkapan utama lainnya. Unit ini menjadi solusi yang sangat dibutuhkan di tengah kesibukan kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas ibadah para santri yang padat.

Dalam pengelolaannya, BUMP berkolaborasi dengan mitra dari masyarakat sekitar yang memiliki usaha laundry rumahan. Sistem ini terbukti efektif dalam mendistribusikan pekerjaan dan mempercepat proses pelayanan. Selain membantu santri, layanan laundry ini juga membuka kesempatan pemberdayaan bagi masyarakat lokal, terutama ibu rumah tangga, sehingga mendukung fungsi sosial ekonomi BUMP sebagai sarana kolaborasi pesantren dengan warga sekitar.

4. Bengkel Buwono *Auto Service*

Buwono Auto Service adalah unit usaha yang fokus pada jasa servis kendaraan roda empat, terutama milik guru, staf, dan jaringan sekitar pesantren. Usaha ini digerakkan oleh BUMP dan dikelola langsung oleh guru

yang memiliki keahlian teknis dalam bidang otomotif. Meski skalanya masih kecil, unit ini menjadi cikal bakal lahirnya layanan jasa berbasis keterampilan di lingkungan pesantren yang bisa menjadi rujukan untuk pelatihan vokasional bagi santri SMK ke depannya.

Tantangan utama dari unit ini adalah tingginya kebutuhan modal, terutama untuk penyediaan peralatan bengkel dan suku cadang yang harganya tidak murah. Selain itu, permintaan jasa servis yang masih terbatas pada lingkungan internal menyebabkan perputaran modal belum optimal. Namun begitu, unit ini tetap memiliki nilai strategis sebagai tempat pelatihan, sumber pendapatan tambahan, dan bukti komitmen BUMP dalam mengembangkan usaha jasa yang berbasis pada kompetensi warga pesantren.

Monitoring dan Evaluasi

Sebagai lembaga usaha yang berada di bawah naungan pesantren, BUMP tidak hanya dituntut untuk menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk menjaga kualitas tata kelola serta menjamin kesinambungan usaha, dibutuhkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berkesinambungan. Proses ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati dan mengawasi jalannya suatu aktivitas. Meskipun bisa dilakukan secara manual, monitoring tetap perlu dilakukan secara langsung agar hasil pengamatannya lebih akurat dan nyata (Aditya et al., 2021). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMP Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro menerapkan sistem monitoring yang melibatkan dua jalur utama, yaitu internal dan eksternal. Monitoring internal dilakukan melalui pelaporan rutin oleh masing-masing unit usaha kepada bendahara BUMP dan pengurus yayasan. Pelaporan ini mencakup transaksi keuangan harian, kebutuhan operasional, serta kendala teknis di lapangan. Monitoring ini menjadi langkah awal dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan unit usaha, mengingat struktur kelembagaan BUMP masih dalam tahap penguatan.

Selain itu, monitoring eksternal dilakukan oleh pihak Bank Indonesia (BI), mengingat BUMP merupakan bagian dari program pembinaan bisnis pesantren dalam jejaring Hibitren (Himpunan Bisnis Pesantren). Dalam konteks ini, BI tidak hanya berperan sebagai pembina, tetapi juga melakukan pendampingan administratif dan teknis untuk memastikan bahwa BUMP memenuhi standar kelayakan manajemen dan keuangan. Dengan adanya pengawasan dari lembaga eksternal seperti BI, proses monitoring menjadi lebih objektif dan mendorong BUMP untuk semakin profesional dalam pengelolaan laporan, penyusunan target usaha, hingga pengendalian risiko keuangan.

2. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses menilai sejauh mana suatu kegiatan telah mencapai tujuannya dan memberikan dampak yang diharapkan (Anwar, 2021).

Di lingkungan BUMP, evaluasi menjadi kegiatan penting yang dilaksanakan secara berkala dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan usaha. Proses evaluasi dilakukan minimal sebulan sekali dalam bentuk rapat koordinasi yang dihadiri oleh pengurus BUMP, petugas unit usaha, dan bendahara yayasan. Rapat ini menjadi forum untuk mengkaji laporan keuangan, membahas kendala yang muncul selama pelaksanaan usaha, serta merancang langkah-langkah perbaikan pada periode selanjutnya. Dalam forum evaluasi ini, sering kali muncul inisiatif baru yang berasal dari petugas lapangan maupun santri yang terlibat, sehingga suasana partisipatif sangat terasa.

Lebih dari sekadar kegiatan administratif, evaluasi juga menjadi instrumen penting dalam penguatan kelembagaan dan penanaman budaya kerja profesional di lingkungan pesantren. Hasil dari evaluasi bulanan kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis oleh yayasan, seperti penambahan tenaga kerja, pengaturan ulang sistem pelaporan, maupun pembaharuan mitra kerja. Ke-depan, penting bagi BUMP untuk mendokumentasikan hasil-hasil evaluasi tersebut dalam bentuk laporan berkala agar dapat menjadi basis penilaian performa tahunan sekaligus referensi dalam menyusun rencana jangka menengah dan panjang unit usaha pesantren.

Kontribusi Tim Pengabdian

Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat, tim pengabdian tidak hanya melakukan observasi dan wawancara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam mendukung penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Bentuk kontribusi ini dirancang berdasarkan kebutuhan riil yang ditemukan di lapangan, serta disesuaikan dengan kapasitas mitra agar dapat dilanjutkan secara mandiri di masa mendatang. Adapun kontribusi konkret yang diberikan oleh tim pengabdian antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan Format Pelaporan Keuangan Sederhana

Tim pengabdian menyusun dan memperkenalkan format pelaporan keuangan harian dan bulanan berbasis *Microsoft Excel* yang mudah digunakan oleh pengurus BUMP, khususnya oleh petugas kantin dan layanan laundry. Format ini meliputi pencatatan pemasukan, pengeluaran, saldo kas, dan pelaporan laba-rugi sederhana. Format tersebut dirancang agar bisa digunakan oleh orang dengan latar belakang pendidikan terbatas, serta dapat diperbanyak dan disesuaikan untuk tiap unit usaha. Hasil pelatihan ini juga dibekali dengan simulasi pengisian data secara langsung untuk memastikan bahwa pengurus benar-benar memahami penggunaannya.

2. Pendampingan Penyusunan SOP Operasional Unit Usaha

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja yang penting dimiliki oleh setiap lembaga atau unit usaha, karena berfungsi untuk memastikan aktivitas berjalan secara terstruktur dan efisien. SOP yang disusun dengan baik akan membantu seluruh elemen sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas secara konsisten dan terukur (Muhaling et al., 2021).

Dalam konteks ini, tim pengabdian juga membantu menyusun draft awal Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk unit usaha kantin dan laundry. SOP ini mencakup alur kerja harian, jadwal pelayanan, alur pelaporan keuangan, mekanisme penanganan keluhan, serta skema pembagian keuntungan. Tujuan dari penyusunan SOP ini adalah agar pengelolaan usaha tidak semata-mata bergantung pada individu tertentu, tetapi dapat berjalan secara sistemik, bahkan jika ada pergantian petugas di kemudian hari. Dengan adanya SOP ini, proses pengelolaan menjadi lebih tertib, transparan, dan mudah diaudit oleh pengurus yayasan.

3. Pemetaan Legalitas Usaha dan Akses Layanan Pemerintah

Legalitas usaha merupakan aspek penting yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha sebagai bentuk pemenuhan standar hukum dan pengakuan formal dari pemerintah. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemenuhan aspek legalitas menjadi syarat utama untuk dapat bersaing secara sehat di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka (Anggraeni, 2022). Melihat kendala legalitas yang dihadapi oleh unit Dipo Water, tim pengabdian turut memberikan kontribusi berupa pemetaan alur dan persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk pengurusan izin edar air minum kemasan. Tim menyusun daftar tahapan yang harus dilalui, termasuk instansi yang dapat dihubungi seperti Dinas Kesehatan, BPOM, dan Dinas Koperasi UMKM. Selain itu, tim juga menyusun daftar potensi program bantuan pemerintah atau CSR yang dapat diakses untuk mendukung legalisasi dan pengembangan usaha. Informasi ini disampaikan dalam bentuk panduan cetak yang diserahkan langsung kepada pengurus BUMP.

4. Pelatihan Manajemen Dasar bagi Pengurus dan Petugas

Kualitas manajemen merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu usaha. Manajemen yang terorganisir dengan baik akan mendorong kemajuan, sedangkan manajemen yang lemah berisiko menghambat bahkan menggagalkan jalannya usaha (Hardana et al., 2022). Untuk mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan kapasitas SDM, tim pengabdian mengadakan pelatihan manajemen usaha mikro sederhana yang diikuti oleh pengurus dan petugas dari unit usaha BUMP. Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan stok barang, pencatatan kas harian, perencanaan belanja, serta strategi pengelolaan modal usaha kecil. Pelatihan dilakukan secara interaktif agar peserta aktif bertanya dan melakukan praktik langsung. Melalui pelatihan ini, tim pengabdian berharap terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan pengelolaan usaha, meskipun dijalankan dalam skala sederhana.

Kemanfaatan Keberadaan BUMP dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa meskipun secara nominal kontribusi finansial dari unit-unit usaha yang dikelola BUMP masih tergolong kecil, namun dampak sosial dan fungsional yang diberikan cukup besar terhadap ekosistem Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Keberadaan BUMP

tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi internal, melainkan juga memberikan kontribusi nyata dalam aspek sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Misbah (2021) bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam membangun kekuatan ekonomi berbasis komunitas, karena memiliki struktur sosial yang kohesif, jaringan internal yang kuat, serta modal sosial yang tinggi. Beberapa kemanfaatan utama yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Kemandirian Ekonomi Internal

Unit usaha yang dijalankan BUMP telah memberikan kontribusi terhadap pembiayaan operasional pesantren, khususnya untuk penggajian petugas dan kebutuhan barang habis pakai. Meskipun belum besar, pemasukan rutin dari unit seperti kantin, laundry, Dipo Water, dan Bengkel Buwono Auto Service menjadi sumber pendanaan alternatif yang membantu meringankan beban yayasan. Menurut Fathony et al. (2021), penguatan usaha mikro dalam lingkungan pesantren dapat menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian ekonomi pesantren secara berkelanjutan, terutama jika dikelola dalam skema lembaga formal seperti koperasi atau BUMP.

Hal ini menunjukkan adanya embrio kemandirian ekonomi pesantren yang perlahan mulai tumbuh. Ketergantungan pada donatur atau sumber dana eksternal dapat ditekan secara bertahap, seiring dengan perkembangan kapasitas usaha yang dikelola. Selain itu, dana dari hasil usaha juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial pesantren, seperti subsidi biaya santri kurang mampu, serta alokasi modal untuk pemeliharaan fasilitas pendidikan. Model ini memperlihatkan bahwa BUMP telah mampu menjadi instrumen pendukung fungsi pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup institusinya secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Aksesibilitas Kebutuhan Warga Pesantren

Salah satu manfaat konkret dari BUMP adalah meningkatnya aksesibilitas terhadap kebutuhan sehari-hari santri, guru, dan karyawan. Dengan adanya unit usaha seperti kantin, laundry, layanan air minum dan bengkel mobil, warga pesantren dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar dari lingkungan pondok. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, hal ini mencerminkan terbentuknya sistem ekonomi lokal berbasis komunitas (*community-based economy*), di mana kebutuhan kolektif dipenuhi melalui mekanisme internal, efisien, dan berbasis nilai (Wahib & Susanto, 2024).

Kondisi ini tidak hanya menciptakan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi praktis bagi warga pesantren. Harga yang ditawarkan pun relatif lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran, karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi santri dan dipatok dengan prinsip sosial, bukan semata-mata komersial. Lebih jauh, ketersediaan kebutuhan pokok di lingkungan internal menjamin efisiensi waktu dan pengawasan. Misalnya, keberadaan layanan laundry dan makanan di dalam pesantren turut membantu meminimalkan interaksi santri dengan dunia luar

yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai pesantren. Hal ini secara tidak langsung mendukung proses pendidikan karakter yang lebih kondusif dan terjaga.

3. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar

BUMP juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar pesantren, khususnya pada unit usaha yang membutuhkan tenaga tambahan seperti kantin dan laundry. Banyak masyarakat lokal yang terlibat sebagai pemasok makanan ringan, pengelola laundry mitra, bahkan sebagai teknisi bengkel. Kolaborasi ini menciptakan simbiosis mutualisme antara pesantren sebagai institusi dan masyarakat sebagai mitra ekonomi yang diberdayakan. Menurut Diatmika & Rahayu (2022), pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui pelibatan aktif warga lokal dalam proses produksi dan distribusi, sehingga mendorong lahirnya kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Partisipasi masyarakat ini tidak hanya memberi dampak langsung berupa tambahan penghasilan dan pembukaan lapangan kerja skala kecil, tetapi juga memperkuat posisi pesantren sebagai institusi yang inklusif dan adaptif terhadap lingkungan sosialnya. Hubungan kerja sama yang terjalin secara rutin menciptakan jaringan sosial yang lebih erat, meningkatkan rasa memiliki terhadap pesantren, dan pada akhirnya memperkuat peran pesantren sebagai pusat peradaban yang mampu menjalankan fungsi religius sekaligus fungsi sosial-ekonomi secara beriringan. Dengan demikian, BUMP tidak hanya berdampak internal, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

4. Pendidikan dan Pembelajaran Kewirausahaan

Manfaat lain yang tak kalah penting dari keberadaan BUMP adalah sebagai sarana pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi santri. Beberapa unit usaha, seperti Dipo Water dan kantin, melibatkan santri dalam kegiatan operasional harian secara terbatas, baik dalam hal distribusi, pencatatan barang, maupun pengemasan produk. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, etos kerja, dan keterampilan ekonomi sejak dini. Menurut Ramadhan et al. (2025), pendidikan berbasis pengalaman (*experiential learning*) seperti keterlibatan dalam usaha mandiri dapat membentuk karakter mandiri dan kemampuan adaptif dalam menghadapi dunia nyata.

Partisipasi aktif santri dalam kegiatan unit usaha ini menjadi bagian dari proses pembelajaran kontekstual yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Model ini sejalan dengan visi besar pesantren dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu keagamaan, tetapi juga cakap dalam aspek ekonomi dan kewirausahaan. Dalam jangka panjang, pelatihan semacam ini diyakini akan menjadi bekal penting ketika santri kembali ke masyarakat, sehingga keberadaan BUMP tidak hanya berdampak pada penguatan institusi pesantren saat ini, tetapi juga berkontribusi terhadap terbentuknya kemandirian ekonomi umat secara lebih luas.

Kendala Penguatan Kelembagaan BUMP dalam Perspektif Manajerial dan Legalitas Usaha

Dalam pelaksanaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, ditemukan sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi fungsi ekonomi dan kelembagaan. Kendala-kendala ini menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi penguatan kelembagaan BUMP ke depan. Adapun kendala yang paling dominan meliputi aspek permodalan, sumber daya manusia, serta skalabilitas dan legalitas usaha.

1. Permodalan Terbatas

Salah satu tantangan umum dalam menjalankan dan mengembangkan usaha adalah keterbatasan modal, yang kerap menjadi hambatan utama dalam perluasan skala dan peningkatan kualitas layanan (Saputra et al., 2025). Keterbatasan modal menjadi salah satu kendala utama dalam mengembangkan unit usaha BUMP. Dana pesantren yang tersedia umumnya diprioritaskan untuk kebutuhan pokok seperti pembangunan gedung pendidikan, renovasi asrama santri, dan penyediaan sarana belajar. Akibatnya, pengembangan unit-unit usaha seperti bengkel, produksi air minum, dan ekspansi kantin sering kali terhambat karena kekurangan dana segar. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa rencana inovasi dan ekspansi usaha belum dapat direalisasikan secara maksimal. Sejalan dengan temuan Muhammad (2023), pembiayaan sosial syariah seperti zakat produktif, wakaf usaha, dan dana bergulir berbasis komunitas dapat menjadi alternatif pendanaan yang sesuai dengan karakter pesantren.

Melihat kondisi tersebut, strategi penyelesaian masalah permodalan perlu dirancang secara sistematis dan terpisah dari pembiayaan pendidikan formal pesantren. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah membangun sistem keuangan *dual-track*, yakni pemisahan antara dana sosial-pendidikan dan dana usaha, agar tidak saling membebani. Selain itu, pengurus BUMP dapat menjalin kemitraan dengan lembaga strategis seperti Bank Indonesia, lembaga amil zakat nasional, maupun koperasi pesantren, guna memperoleh akses pada dana bergulir atau skema pembiayaan syariah. Alternatif lain yang layak dipertimbangkan adalah mendorong partisipasi alumni dan wali santri melalui skema investasi internal berbasis wakaf produktif atau kepemilikan saham usaha. Dengan pendekatan kolaboratif semacam ini, tantangan modal tidak hanya ditanggulangi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan BUMP secara berkelanjutan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses strategis untuk mengelola dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik karyawan, manajer, maupun staf lainnya, guna mencapai tujuan organisasi secara efektif (Amelia et al., 2022). Dalam konteks ini, permasalahan SDM menjadi hambatan berikutnya. Sebagian besar pengurus BUMP juga merangkap tugas di unit lain, seperti mengajar di lembaga formal

atau mengelola panti asuhan. Kondisi ini menyebabkan kurangnya fokus, keterbatasan waktu, dan minimnya inovasi dalam pengelolaan unit usaha. Akibatnya, sistem manajemen sering bersifat manual, kurang terstruktur, dan belum mampu merespons tantangan pasar secara adaptif. Menurut Sabrina (2021), keberhasilan organisasi sangat bergantung pada bagaimana manajemen SDM dapat mengatur beban kerja dan distribusi tanggung jawab secara proporsional.

Melihat tantangan tersebut, upaya perbaikan dalam pengelolaan SDM menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan. Untuk solusi jangka pendek, sangat disarankan adanya penunjukan personel khusus yang fokus menangani BUMP secara penuh waktu, agar pengelolaan tidak bersifat sambilan dan dapat dilakukan secara lebih profesional. Sedangkan dalam jangka panjang, pesantren perlu mengembangkan sistem kaderisasi yang berkelanjutan, seperti pelatihan kewirausahaan bagi santri senior, pemberdayaan alumni yang memiliki latar belakang usaha, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Dengan adanya struktur kerja yang terorganisir dan berorientasi jangka panjang, kinerja kelembagaan BUMP akan lebih stabil dan tidak tergantung pada individu tertentu.

3. Skalabilitas dan Legalitas

Kendala ketiga berkaitan dengan aspek legalitas dan kemampuan usaha untuk berkembang ke pasar yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah unit usaha Dipo Water yang belum mengantongi izin edar dari lembaga terkait, sehingga distribusinya masih terbatas pada lingkup internal pesantren. Legalitas ini menjadi penting untuk meningkatkan kredibilitas dan jangkauan pasar ke luar pesantren, sekaligus sebagai syarat mutlak jika ingin menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Menurut Aufat et al. (2025), legalitas usaha bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial dan ekonomi yang dapat memperkuat posisi usaha dalam ekosistem bisnis yang lebih luas.

Melihat pentingnya aspek legal ini, diperlukan strategi konkret untuk membantu BUMP dalam memenuhi berbagai persyaratan legalitas usaha. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah pendampingan aktif dalam proses perizinan melalui instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, atau lembaga sertifikasi halal. Dalam konteks hibitren dan pembinaan Bank Indonesia, peluang pelatihan dan fasilitasi perizinan sebenarnya sangat terbuka, dan perlu dimanfaatkan secara maksimal oleh pengurus BUMP. Dengan legalitas yang sah, unit usaha tidak hanya dapat memperluas jangkauan pasarnya, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan mitra usaha eksternal seperti koperasi, ritel lokal, hingga marketplace berbasis komunitas pesantren. Maka, penguatan aspek legal bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi langkah strategis menuju keberlanjutan dan daya saing usaha pesantren.

Tabel 1. Ringkasan Kendala dan Solusi Strategis Pengembangan BUMP

No	Aspek Kendala	Uraian Masalah	Solusi Strategis
1	Permodalan	Dana pengembangan unit usaha terbatas karena difokuskan untuk pembangunan fisik dan kebutuhan pendidikan pesantren.	<ul style="list-style-type: none">– Memisahkan dana sosial dan dana usaha– Menjalinkan kerjasama dengan mitra eksternal (BI, LAZ, koperasi)– Menawarkan skema wakaf produktif atau saham internal usaha
2	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pengurus BUMP merangkap tugas di unit lain sehingga kurang fokus dan minim inovasi dalam pengelolaan usaha.	<ul style="list-style-type: none">– Menetapkan staf khusus untuk BUMP secara penuh waktu– Melakukan pelatihan dan kaderisasi– Menyusun SOP operasional unit usaha secara profesional
3	Skalabilitas dan Legalitas	Unit usaha seperti Dipo Water belum memiliki izin edar resmi, sehingga distribusi terbatas di lingkungan internal pesantren.	<ul style="list-style-type: none">– Mengurus legalitas usaha (izin edar, sertifikat halal, dan izin usaha mikro)– Mengikuti pendampingan usaha dari Dinas terkait dan program Hibitren BI

Sumber: Tabel Diolah Peneliti

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kemandirian ekonomi pesantren sekaligus pemberdayaan masyarakat sekitar. Meskipun kontribusi finansialnya masih terbatas, BUMP telah memainkan peran strategis dalam penyediaan layanan internal, peningkatan aksesibilitas kebutuhan santri, serta sebagai sarana pendidikan kewirausahaan dan pelatihan manajerial bagi santri dan pengurus. Namun demikian, penguatan kelembagaan BUMP masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terbatasnya modal, belum optimalnya manajemen sumber daya manusia, serta belum lengkapnya aspek legalitas usaha. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, tim pengabdian memberikan kontribusi langsung yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan, seperti penyusunan sistem pelaporan keuangan sederhana, pendampingan penyusunan SOP, pemetaan proses legalisasi usaha, dan pelatihan manajemen dasar. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem usaha yang lebih tertib, profesional, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan

pesantren ke depan. Oleh karena itu, keberadaan BUMP perlu terus diperkuat sebagai model kelembagaan ekonomi pesantren yang berorientasi pada kemandirian, keberlanjutan, dan pemberdayaan umat secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pengurus BUMP, Bapak Mahbub Junaidi, dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Bapak Risyanto, atas waktu, data, dan akses yang sangat membantu kelancaran kegiatan pengabdian. Penghargaan juga diberikan kepada Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro atas dukungan dan keterbukaannya. Terima kasih kepada STAI Senori Tuban atas kepercayaan, arahan, dan dukungan penuh dalam mewujudkan kolaborasi antara kampus dan masyarakat pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Pranatawijaya, V. H., & Putra, P. B. A. A. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Kegiatan Menggunakan Metode Prototype. *JOINTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*.
- Albirruni, K. A. (2024). Peran Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) Dalam Meningkatkan Perekonomian Pesantren (Study Kasus Di Pondok Pesantren Inklusi Tri Bhakti Al-Qudwah, Metro Selatan, Kota Metro). *Skripsi: IAIN Metro*.
- Alfianto, A. N., & Anam, K. (2025). Pesantren Entrepreneur: Studi Pada Unit Usaha Pondok Pesantren Mambaul Huda Kabupaten Magelang. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*.
- Amelia, A., Manurung, K. A., & Purnomo, M. D. B. (2022). Peranan Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi. *Mimbar Kampius: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*.
- Anwar, K. (2021). Urgensi Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. *RAUSYAN FIKR: Jurnal Pemikiran & Pencerahan*.
- Aufat, M. F., Arjunita, S., Efika, N., & Hasni, H. (2025). Analisis Pentingnya Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Jaminan Keabsahan Usaha. *Journal Of Information Systems Management And Digital Business*.
- Basri, H. H. (2021). Dari Pemetaan Hingga Profiling “100 Pesantren Ekonomi.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Damanik, F. H. S. (2023). Pengembangan Model Pembelajaran Kolaboratif Untuk Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi Di Era Digital. *Prosiding Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*.

- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Fathony, A., Rokaiyah, & Mukarromah, S. (2021). Pengembangan Potensi Unit Usaha Pondok Pesantren Nurul Jadid Melalui Ekoproteksi. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*.
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Misbah, A. (2021). Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren. *Jurnal Al-Iqtishod*.
- Muhaling, A. R., Palandeng, I. D., & Sumarauw, J. S. B. (2021). Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pada PT. Taspen (Pesero) Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Muhammad, H. S. (2023). Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Pesawaran). *Disertasi: Uin Raden Intan Lampung*.
- Nurjannah, S., Helvira, R., & Zulinda, N. (2025). *Santri preneurship, Membangun Kemandirian Ekonomi Berbasis Pesantren*.
- Rahman, F. (2022). Pengembangan Usaha Bisnis dalam Membangun Kemandirian Pesantren. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*.
- Ramadhan, D., Nurlaili, I., Primastuti, K. P., Widyawati, R., Farida, V., & Muhtarom, T. (2025). Mengembangkan Karakter Aktif dan Mandiri Dengan Metode Experiential Learning di SD IT Alam Nurul Islam. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Riana, R. (2023). Peran Badan Usaha Milik Pesantren Fathul 'Ulum Kwagean Kediri Dalam Meningkatkan Perekonomian Pondok Ditinjau Dari Produksi Islam. *Skripsi: IAIN Kediri*.
- Sabrina, R. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Vol. 1). UMSU Press.
- Safitri, A. A. D., & Hammam. (2025). Analisis Strategi Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dalam Menunjang Ekosistem Halal di Kabupaten Bangkalan: (Studi pada Pondok Pesantren Al Falah Kepang). *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*.
- Sangian, D., Dengo, S., & Pombengi, J. (2018). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*.

Sapriadi, N. R., Majid, J., & Shadriyah. (2024). Sistem Pengelolaan Dana Berkelanjutan Berbasis Kemandirian Ekonomi di Pesantren An Nahdliyin Lerang. *Islamic Banking and Finance*.

Saputra, H., Fonataba, P. W., Wudda, A. R., Chintia, A., Ardana, A., Zulfri, A., Pasaribu, R., Rahma, Z., Hasibuan, K. M., & Yazid, M. U. (2025). Peran Manajemen Agribisnis dan Diversifikasi Produk dalam Keberlanjutan Usaha Susu Kambing Rumahan: Studi Kasus pada Usaha Ibu Sri Endang Hartati. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*.

Wahib, M., & Susanto, A. (2024). Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat. *Journal of Economic, Business, Management, Accounting And Social Sciences*.